Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

7%

Overall Similarity

Date: Sep 10, 2024
Matches: 703 / 10033 words
Sources: 26

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:
Scan this QR Code

149 Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 41 No. 2, Desember 2023: 149-165 PENINGKATAN KAPASITAS KEMITRAAN UNTUK MENDORONG RANTAI NILAI KOMODITAS KOPI YANG BERKELANJUTAN Increasing Partnership Capacity to Drive Sustainable Coffee Commodity Value Chains Muhammad Ibnu Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jln. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 24 1, Bandar Lampung 35145, Indonesia Email: muhammad.ibnu@fp.unila.ac.id Naskah diterima: 27 Februari 2024 Direvisi: 1 April 2024 Disetujui terbit: 1 Mei 2024 ABSTRACT Coffee is one of the world's most traded agricultural commodities, but sustainability in its value chain remains an issue. While governments, companies, and non-governmental organizations (NGOs) play a strategic role in the value chain, the gatekeepers of sustainability, namely coffee farmers, have a weak position. Cross-sector partnerships have the potential to serve as an innovative mechanism to address sustainability issues in coffee value chains by changing the relationships between key actors in the chain to make them more equitable and mutually beneficial. However, the capacity of partnerships to do this empirically is still unknown, especially when linked to the farmer context. This paper uses a literature review method to analyze partnership capacity from the perspectives of governance and development studies. The results of the review show that the governance perspective sees partnerships as initiators and agents 2 of change in the coffee value chain. On the other hand, the development perspective critically views partnerships driven by businesses and NGOs still having ambiguous impacts on farmers. As part of the neoliberal agenda, partnership seems unable to provide solutions to various gaps in the coffee value chain. Thus, the partnership needs to be improved by adopting a more inclusive business model that involves all stakeholders and is built with a bottom-up perspective that considers the local situation and context. Keywords: certification, coffee, governance, partnership, standardization, value chain ABSTRAK Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling banyak diperdagangkan secara global, tetapi keberlanjutannya masih menjadi isu di dalam rantai nilainya. Sementara pemerintah, perusahaan, 7 dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran strategis dalam rantai nilai, namun aktor

utama keberlanjutan yaitu petani kopi justru memiliki posisi yang lemah. Kemitraan lintas sektor memiliki potensi sebagai mekanisme inovatif untuk mengatasi masalah keberlanjutan dalam rantai nilai kopi, dengan mengubah hubungan antara para pelaku utama dalam rantai agar lebih setara dan saling menguntungkan. Namun, kapasitas kemitraan untuk melakukannya secara empiris masih belum diketahui, terutama apabila dikaitkan dengan kontekstual petani. Tulisan ini menggunakan metode tinjauan literatur untuk menganalisis kapasitas kemitraan dari perspektif studi tata kelola dan perspektif studi pembangunan. Hasil reviu menunjukkan bahwa perspektif tata kelola melihat kemitraan sebagai inisiator dan agen perubahan di dalam rantai nilai kopi. Perspektif pembangunan sebaliknya secara kritis memandang kemitraan yang dimotori oleh bisnis dan LSM, masih memiliki dampak ambigu bagi petani. Sebagai bagian dari agenda neoliberal, kemitraan tampaknya belum mampu memberikan solusi bagi berbagai kesenjangan dalam rantai nilai kopi. Implikasinya adalah kemitraan perlu berbenah dengan cara mengadopsi model bisnis yang lebih inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan dibangun dengan perspektif bottom-up yang mempertimbangkan situasi dan konteks lokal. Kata kunci: kemitraan, kopi, rantai nilai, standardisasi, sertifikasi, tata kelola PENDAHULUAN Kopi merupakan komoditas bernilai tinggi di tingkat global, dengan nilai tambah yang tinggi, dan telah lama menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia. Namun demikian, belum seluruh pelaku dalam rantai nilai kopi mendapatkan manfaat yang adil dan memuaskan, terutama petani kecil. Hal ini terjadi karena para pelaku umumnya bekerja sendirisendiri sehingga rentan terjadi eksploitasi dan/atau ketidakseimbangan kekuatan ekonomi (misalnya, daya tawar dan modal) di dalam rantai nilai. Dengan demikian, sistem rantai nilai yang berlangsung membutuhkan kemitraan antarpelaku agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Kopi merupakan komoditas pionir untuk penerapan standar dan sertifikasi berkelanjutan

 (Partzsch et al. 2021; Renard 2022). Standar berkelanjutan merupakan dokumentasi kriteriakriteria

khusus yang berfungsi sebagai definisi, aturan, dan pedoman untuk memastikan bahwa kopi diproduksi, diproses, dan diperdagangkan sesuai dengan pilar berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis (sertifikat) bahwa suatu produk dan proses telah sesuai dengan standar (Delmas and Gergaud 2021; Dos Santos et al. 2021). Para pemrakarsa mengklaim bahwa standar dan sertifikasi dibentuk 23 berdasarkan Teori Perubahan (the Theory of Change) (de Janvry and Sadoulet 2020). Teori Perubahan memiliki premis bahwa pelatihan praktik pertanian yang lebih baik, dan organisasi petani yang lebih baik, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi. Selanjutnya, produksi kopi yang lebih berkelanjutan akan tercapai dan pada akhirnya meningkatkan mata pencaharian petani kecil (Glasbergen 2018). Kekhawatiran konsumen terhadap kondisi lingkungan dan sosial produksi kopi telah mendorong berkembangnya kemitraan antaraktor swasta global, terutama antara bisnis dan LSM di dunia barat. Kemitraan tersebut menghasilkan inisiatif keberlanjutan dalam bentuk beragam skema standar dan sertifikasi keberlanjutan dan klaim tentang pelabelan. Di Indonesia, struktur pasar kopi yang cenderung oligopsoni menyebabkan aktor swasta, terutama perusahaan-perusahaan global/multinasional, memiliki pengaruh yang dominan dalam tata kelola rantai komoditas kopi (Wahyudi et al. 2020). Standar dan sertifikasi yang mulanya diklaim bersifat sukarela, telah 20 menjadi de facto keharusan bagi petani kecil untuk dapat mengakses pasar global. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kemitraan dalam rantai nilai komoditas pertanian, khususnya kopi, sehingga memberikan peluang untuk terciptanya teori dan aplikasi kemitraan yang lebih luas. Mekanisme kemitraan yang menjadi perhatian adalah standar dan sertifikasi berkelanjutan (sustainability standard and certification) yang ada di dalam rantai nilai kopi. Tulisan ini menyampaikan hasil analisis kapasitas kemitraan lintas sektor dalam mendorong perubahan berkelanjutan di dalam rantai nilai komoditas kopi, dengan memfokuskan analisis berdasarkan perspektif dua untaian literatur (literature strand), yaitu literatur studi pembangunan (development study) dan literatur studi tata kelola (governance study). Kedua untaian literatur tersebut, dari perspektif yang berbeda, dapat menjelaskan

kapasitas dan implikasi kemitraan sebagai pengaturan kelembagaan baru (new institutional arrangements) di rantai nilai komoditas pertanian. Walaupun mengakui potensi kemitraan, kedua untaian literatur tersebut mempertimbangkan isu-isu kritis yang mempertanyakan kapasitas kemitraan untuk memenuhi harapan pembangunan pertanian berkelanjutan. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Proses melakukan ulasan literatur dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah mencari studi-studi tentang kemitraan dengan memanfaatkan mesin pencari (search engine) seperti Google Scholar dan bibliographic database seperti Science Direct dan Web of Science. Tahap kedua adalah memilih studi-studi yang relevan, baik yang menggunakan pendekatan kuantitatif (survei, analisis profitabilitas ekonomi, dan analisis statistik) maupun yang menggunakan metodologi kualitatif (observasi, wawancara, diskusi grup terfokus/ focus group discussion, dan studi kasus). Studistudi yang terpilih fokus pada kopi, dilakukan di Indonesia dan di negara-negara 1 produsen kopi lainnya (seperti Afrika dan Amerika Latin). Tahap ketiga adalah membaca secara detail literatur untuk memahami bagaimana komparasi antara perspektif tata kelola (governance perspective) dan perspektif pembangunan (development perspective) tentang kapasitas kemitraan. Poin penting dari komparasi adalah orientasi hasil, yaitu bagaimana kedua perspektif tersebut menilai hasil-hasil kemitraan. Secara keseluruhan, literatur 25 yang menjadi referensi dalam penelitian ini berjumlah 94 buah yang mayoritas (96,8%) dipublikasikan dalam rentang tahun 10 tahun terakhir (2014–2024). Literatur utama yang dianalisis adalah publikasi hasil-hasil penelitian (81 buah atau 86%) dan dilengkapi dengan referensi relevan berjenis buku (empat buah), laporan (enam buah) dan laman web (tiga buah). Penelitian ini menggunakan perangkat lunak manajer referensi Mendeley untuk mengorganisasikan literatur. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RANTAI NILAI KOMODITAS KOPI Sebagai komoditas global, kopi diperdagangkan secara internasional sehingga para petani berhadapan dengan berbagai jenis standar dan sertifikasi yang beroperasi secara global. Standar dan 13 sertifikasi global dimulai dengan perkembangan Organic Movement pada tahun 1939, diikuti oleh Fairtrade pada tahun 1988 dan Rainforest Alliance pada tahun

1991.

PENINGKATAN KAPASITAS KEMITRAAN UNTUK MENDORONG RANTAI NILAI KOMODITAS KOPI YANG BERKELANJUTAN Muhammad Ibnu 151 Satu dekade kemudian, lebih banyak sertifikasi diperkenalkan, termasuk Utz Kapeh pada tahun 2002 (KPMG Sustainability 2013) dan the Common Code for the Coffee Community (4C) pada tahun 2006 (4C Association 2019). Semua skema sertifikasi tersebut memprioritaskan aspek produksi kopi berkelanjutan, namun pada penekanan yang berbeda. Fairtrade berkonsentrasi pada peningkatan aspek sosial produksi kopi, sedangkan Utz Kapeh berfokus pada efisiensi pertanian dan keterlacakan (traceability) kopi (Ibnu 2017; Hajjar et al. 2019). Rainforest Alliance memberikan banyak perhatian pada aspek lingkungan (Gather and Wollni 2022), sementara 4C menekankan perlunya pemenuhan kriteria pokok dalam pilar pembangunan berkelanjutan (Global Coffee Platform/GCP 2017). Implementasi standar dan sertifikasi menciptakan regulasi baru terkait etika produksi dan lingkungan, yang selanjutnya berimplikasi pada struktur rantai nilai dan institusi dalam sistem produksi kopi di Indonesia (Sustainable Coffee Program 2014). Regulasi tersebut mendorong perubahan struktural dalam hal organisasi petani, hubungan pedagang-petani, dan mengakibatkan peningkatan penetrasi ke hulu oleh pedagang-pedagang besar (perusahaan multinasional) di daerah penghasil kopi di seluruh Indonesia. Terdapat potensi konsekuensi yang tidak diharapkan dari perubahan-perubahan tersebut di masa depan seperti peningkatan biaya transaksi di sepanjang rantai nilai dan tekanan penurunan harga di tingkat petani. Saat ini, standar dan sertifikasi telah berubah menjadi mekanisme kunci dari kemitraan untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan (Alexander 2020; Silva et al. 2020). Berkembangnya kemitraan terkait erat dengan adanya tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional terhadap bisnis (misalnya perusahaan multinasional) untuk menilai kembali tanggung jawab mereka terhadap kondisi produksi kopi di tingkat petani (Mousavi and Bossink 2020). Tuduhan publik tentang degradasi lingkungan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kemiskinan, yang

mulai disuarakan sejak pertengahan 1990-an, merupakan ancaman nyata bagi reputasi dan penjualan perusahaan, terutama bagi produsen bermerek (Islam et al. 2021). Banyak perusahaan berusaha untuk melindungi bisnis mereka dengan terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial, seperti kemitraan dengan petani (Florini and Pauli 2018; Martos-Pedrero et al. 2019). Studi tata kelola berfokus pada perubahan hubungan antara berbagai aktor, termasuk pemerintah (aktor negara), bisnis (aktor pasar), dan LSM (aktor sipil). Literatur tata kelola dicirikan oleh perspektif top-down, memandang bahwa manifestasi dan regulasi kemitraan yang melibatkan aktor-aktor (negara, pasar, dan sipil) merupakan "tata kelola baru" dalam penyelenggaraan negara. Literatur tata kelola melihat kemunculan kemitraan sebagai respons terhadap melemahnya kapasitas negara (pemerintah) untuk memecahkan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh perubahan global, termasuk masalah yang terkait dengan pola produksi dan konsumsi internasional (Langford 2019). Saat peran negara menurun, bisnis (aktor pasar/swasta) justru lebih terlibat dalam proses tata kelola untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang ada, terutama karena tidak adanya atau lemahnya peraturan pemerintah dalam perdagangan komoditas pertanian di pasar global (Cashore et al. 2021). Kemitraan dipandang menciptakan hubungan saling ketergantungan baru antara aktor, dan membuat tindakan pemerintah secara sepihak semakin tidak efektif dalam memecahkan masalah-masalah terkait globalisasi tersebut (Di Gregorio et al. 2019). Kemitraan berpotensi mengatasi masalah tata kelola dengan menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dalam setiap tingkatan rantai nilai kopi. Berdasarkan perspektif tata kelola, aturan dan/atau standar perlu ada dalam setiap tahapan kegiatan produksi (dalam rangka transfer keterampilan teknis) selain pembentukan struktur jejaring/networking (dalam rangka penguatan kapasitas institusional). Studi pembangunan di sisi lain melihat solusi untuk mengatasi permasalahan rantai nilai kopi dari perspektif bottom-up. Dipengaruhi oleh pergeseran paradigma ekonomi-politik pembangunan internasional pada tahun 1990-an (Horner 2020), literatur pembangunan memiliki argumen bahwa aktor individu (baik itu pemerintah, bisnis, maupun pasar) tampaknya gagal dan/atau tidak mampu memecahkan

masalah dalam rantai nilai komoditas pertanian (Marx 2019). Kegagalan tersebut perlu diatasi dengan kolaborasi multi-aktor, di mana kapasitas dari badan-badan pembangunan (seperti LSM) dapat digabungkan dengan sumber daya dan pengetahuan dari aktor pasar/bisnis (Pattberg et al. 2012; Parker et al. 2018; Cashore et al. 2021). Literatur pembangunan memiliki pandangan bahwa bisnis perlu memiliki peran yang baru dan aktif dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan wacana baru pembangunan arus utama (new mainstream development paradigm) yang menekankan interaksi jangka panjang, penyelarasan tujuan, dan saling pengertian antara aktor yang berbeda sebagai dasar utama

Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 41 No. 2, Desember 2023: 149-165 152 untuk perubahan kelembagaan (Zhan 2021). Para aktor pasar/bisnis sebelumnya dianggap sebagai penerima manfaat pembangunan yang “tidak tahu berterima kasih”, namun mereka sekarang mulai diakui potensinya untuk berkontribusi pada pembangunan (Carroll and Brown 2018). Hal ini terlihat menonjol 1 dalam rantai nilai kopi, di mana perusahaanperusahaan multinasional memiliki pengaruh besar pada bagaimana perdagangan kopi dilakukan (Ibnu 2017). PENDEKATAN KONSEP KEMITRAAN Konsep Kemitraan Literatur mendefinisikan kemitraan sebagai kolaborasi sukarela antara dua aktor atau lebih dengan platform yang dilembagakan guna mencapai tujuan dan/atau agenda tertentu secara kolektif (Arslan et al. 2021). 1 Dalam rantai nilai kopi, kemitraan mempromosikan praktik produksi kopi yang berkelanjutan, peningkatan akses pasar dan pendapatan bagi petani, serta pemberdayaan petani kecil (smallholders) (Koopmans et al. 2018; Shelton et al. 2018). Bersamaan dan/atau berkombinasi dengan kegiatan-kegiatan lain di tingkat produsen (petani), kemitraan berpotensi secara langsung menangani praktik produksi dan perilaku bisnis secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada perbaikan standar 1 ekonomi, sosial dan lingkungan secara lebih luas (Alexander 2020). Namun demikian, terdapat berbagai tantangan bagi para aktor untuk menciptakan kemitraan yang efektif seperti hambatan ideologis dan budaya termasuk aspek kognitif dan persepsi

(Selsky and Parker 2005), dinamika sosial (van Hille et al. 2019), masalah legitimasi dan toleransi terhadap risiko (Hahn et al. 2015), serta kompleksitas teknis dan politik (Seitanidi et al. 2013). Kemitraan memiliki kredensial yang positif, namun justru menempatkannya di tengah perdebatan tentang jenis pengaturan kelembagaan (institutional arrangements) apa yang paling menjanjikan untuk mengatasi masalah keberlanjutan (sustainability) yang kompleks, berlapis-lapis, dan multi-skala (Sapkota et al. 2018). Selama dua dekade terakhir, kemitraan yang melibatkan para aktor dari berbagai sektor (kemitraan lintas sektor) telah menarik perhatian para peneliti dan menimbulkan perdebatan di dalam berbagai studi. Walaupun terdapat konsensus badanbadan pembangunan internasional tentang pentingnya kemitraan (OECD 2007; World Bank 2007), kapasitas kemitraan untuk menggerakkan pembangunan pertanian berkelanjutan masih kurang dapat dipahami (Wang et al. 2018; Hermans et al. 2019). Literatur bahkan masih memperdebatkan tentang dampak kemitraan dalam mendorong perubahan berkelanjutan di rantai nilai komoditas pertanian (Dentoni et al. 2018; Barzola Iza et al. 2020). Kemitraan (umumnya antara bisnis dengan LSM) tampaknya telah menjadi kekuatan di luar negara yang mendorong timbulnya tren standar dan sertifikasi berkelanjutan (Bitzer and Glasbergen 2015). Kemitraan telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar sejak akhir 1990-an, khususnya dalam rantai nilai (value chain) komoditas kopi, dengan harapan bahwa mekanisme kolaboratif tersebut akan mampu mengatasi masalah yang krusial bagi pembangunan pertanian berkelanjutan (Florini and Pauli 2018; Tian et al. 2021), seperti degradasi lingkungan, kemiskinan, dan buruknya kondisi kerja petani (Pronti and Coccia 2020). Kekhawatiran akan pasokan kopi yang berkurang dan pertimbangan untuk mengembangkan pasar baru adalah motif penting lain dari kemitraan. Selain itu, karena kopi diperdagangkan secara internasional, kopi dipengaruhi perubahan permintaan global yang semakin menuntut produk berkualitas tinggi dan etis, serta harapan terciptanya pasar baru yang lebih menguntungkan bagi petani (Fischer et al. 2021). Kemitraan di dalam rantai nilai, terutama yang diinisiasi oleh LSM dan bisnis, dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi permintaan global tersebut (Brun et al. 2020). Kapasitas

kemitraan didefinisikan sebagai kemampuan kemitraan untuk mempromosikan dan menciptakan perubahan berkelanjutan 1 dalam rantai nilai kopi. Kemitraan Lintas Sektor Kebijakan pemerintah tampaknya cenderung semakin tidak efektif untuk memberikan perlindungan bagi aktor yang lemah seperti petani di era perdagangan bebas. Konsep kemitraan lintas sektor muncul dengan potensi sebagai mekanisme inovatif untuk mengatasi kelemahan dan/atau kegagalan aktor tunggal, seperti pemerintah, terutama dalam konteks globalisasi (Morisson and Doussineau 2019; Werhane et al. 2020). Kemitraan lintas sektor dicirikan oleh peran aktor negara (pemerintah), pasar (bisnis), dan masyarakat sipil (LSM) yang saling melengkapi sehingga, secara teori memungkinkan pembagian kerja, risiko, dan tanggung jawab di antara aktor yang berpartisipasi (Vestergaard et

 al. 2021). Istilah dan/atau konsep kemitraan lintas sektor dipergunakan di berbagai bidang, mulai dari pembangunan internasional (Martel et al. 2021), pertanian/perkebunan dan kehutanan (Humphreys et al. 2019; Paunov and PlanesSatorra 2019) hingga keanekaragaman hayati (Stephenson et al. 2021) dan perubahan iklim (Doh et al. 2019). Dalam literatur, kemitraan lintas sektor memiliki beberapa istilah, seperti aliansi para pemangku kepentingan (multistakeholder alliance), kemitraan publik-swasta (public-private partnership), jaringan kebijakan publik global (global public policy network), dan jaringan aksi global (global action network) (Calton 2011; McHugh et al. 2012; Hodge and Greve 2017; Witte et al. 2017). Studi menemukan, bahwa kemitraan lintas sektor 1 dalam rantai nilai kopi dapat menstimulasi penerapan standar untuk mendapatkan akses pasar dan pengembangan sumber daya manusia petani untuk mendapatkan sertifikasi (Bitzer et al. 2013). Dengan mentransfer pengetahuan kepada petani, kemitraan menghadirkan sumber perubahan teknologi baru yang berpotensi meningkatkan pengelolaan lingkungan dan manfaat ekonomi (harga kopi) bagi petani (Pfisterer and Van Tulder 2021). Namun demikian,

penekanan kemitraan pada sertifikasi memberikan beban keuangan 1 yang lebih tinggi bagi organisasi petani sehingga kelompok petani sasaran menjadi relatif terbatas. Pada saat yang sama, aset-aset lain dari organisasi petani sering kali tidak cukup kuat untuk mereka dapat beroperasi dengan sukses tanpa dukungan lebih lanjut dari pihak eksternal (Dietz et al. 2021). Kemitraan lintas sektor 1 dalam rantai nilai kopi tampaknya menghadapi dilema antara memprioritaskan petani untuk mendapatkan sertifikasi dan memberdayakan organisasi petani menuju kemandirian. KAPASITAS KEMITRAAN DARI PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PEMBANGUNAN Hasil analisis menunjukkan bahwa literatur tata kelola dan literatur pembangunan memiliki perspektif yang berbeda terkait kapasitas kemitraan dalam mengatasi masalah dalam rantai nilai kopi (Tabel 1). Perbedaan perspektif tersebut terdapat dalam hal empat fungsi utama kemitraan, yaitu penetapan agenda (agendasetting), penetapan aturan (rule-setting), implementasi kebijakan (policy implementation), dan peningkatan skala (upscaling). Penetapan Agenda Penetapan agenda (agenda-setting) merupakan proses penetapan dan penyebaran nilai-nilai keberlanjutan 1 (ekonomi, sosial, dan lingkungan) di sepanjang rantai nilai komoditas kopi (Birkland and Schwaeble 2019). Kemitraan faktanya cukup rumit dilakukan karena ada banyak hubungan (antara produsen dan pembeli/pengecer) dalam rantai nilai kopi, dan setiap aktor dapat memiliki interpretasi yang berbeda tentang nilai-nilai keberlanjutan (van Hille et al. 2020). Perbedaan interpretasi tersebut menghasilkan beragam pendekatan untuk menghadapi tantangan keberlanjutan di dalam rantai nilai kopi, seperti bagaimana seharusnya menyeimbangkan motif ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dentoni et al. 2018; Barzola Iza et al. 2020). Perspektif tata kelola memandang bahwa fungsi penetapan agenda telah terjadi cukup nyata di rantai nilai kopi. Hal tersebut terlihat dari adanya konsensus di antara para pemangku kepentingan bahwa nilai-nilai berkelanjutan perlu diimplementasikan dengan menghilangkan praktik-praktik yang tidak dapat diterima dalam produksi dan perdagangan kopi. Praktik-praktik yang tidak dapat diterima termasuk Tabel 1. Perbedaan perspektif tata kelola dan perspektif pembangunan tentang kapasitas kemitraan Fungsi Utama Kemitraan Perspektif Tata

Kelola Perspektif Pembangunan Penetapan agenda Positif dengan adanya konsensus stakeholder. Rentan disalahgunakan oleh aktor yang kuat di rantai nilai. Penetapan aturan Positif dengan adanya koordinasi baru berbasis pasar di rantai nilai. Menciptakan hambatan bagi petani untuk mengakses pasar ekspor yang lebih menguntungkan. Implementasi kebijakan Positif dengan menghadirkan perubahan teknologi. Perubahan belum menyentuh aspek mendasar yaitu pemberdayaan petani dan organisasinya. Peningkatan skala Positif dengan perluasan akses informasi. Legitimasi dan keberlanjutan kemitraan dipertanyakan. Sumber: hasil analisis

mempekerjakan anak belum cukup umur, perbudakan dan/atau eksploitasi berlebihan terhadap pekerja, penebangan hutan lindung, dan penggunaan bahan kimia (pupuk dan pestisida) secara berlebihan (4C Association 2019). Perspektif tata kelola menganggap bahwa LSM dan bisnis memiliki peran penting dalam fungsi penetapan agenda. LSM merupakan mitra yang berpengetahuan dan kredibel, sementara bisnis (seperti perusahaan multinasional) telah aktif menunjukkan kepemimpinan dalam fungsi penetapan agenda kemitraan (Dentoni et al. 2018; Gallo et al. 2023). Perspektif pembangunan melihat bahwa kemitraan melakukan fungsi penetapan agenda dalam kerangka persetujuan pemangku kepentingan (Lambin and Thorlakson 2018). Kemitraan pada umumnya didukung oleh para pemangku kepentingan yang kuat, terutama perusahaan-perusahaan besar multinasional (Lambin and Thorlakson 2018). Sebagai pembeli utama kopi, dalam struktur pasar yang cenderung oligopsoni, perusahaan-perusahaan besar memiliki daya tawar yang kuat untuk “memaksa” petani melakukan perubahan praktik pertanian. Dengan demikian, struktur kelembagaan di rantai nilai kopi saat ini memungkinkan kemitraan menggerakkan perubahan reformis dengan relatif mudah dalam skala yang besar. Namun, strategi dan/atau model perubahan seperti ini berisiko mengabaikan beberapa penyebab mendasar dari masalah di rantai nilai komoditas kopi, seperti kekuatan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan besar, yang kemudian

cenderung menciptakan ketidakseimbangan sumber daya dan hubungan antara pembeli dan produsen (Grabs and Carodenuto 2021). Selain itu, terbatasnya pilihan pasar dan lemahnya kapasitas petani untuk meningkatkan nilai tambah bagi produknya dapat mengarah ke kondisi eksploitasi di tingkat produksi (Grabs 2020). Kemitraan justru belum melakukan perubahan yang lebih mendasar, seperti pola pikir petani. Oleh karena itu, perspektif pembangunan memandang bahwa pendekatan reformis semacam kemitraan mungkin dapat mengubah beberapa praktik produksi pertanian secara garis besar (mainstream), namun rentan dimanfaatkan untuk memastikan dan memproyeksikan prioritas ekonomi pemangku kepentingan yang kuat (seperti perusahaanperusahaan besar) di dalam rantai nilai (Bitzer and Schouten 2023). Penetapan Aturan Penetapan aturan (rule-setting) merupakan penciptaan norma dan/atau standar baru dalam produksi, pengolahan, dan perdagangan kopi. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan spontan dan tidak terkoordinasi, aktivitas-aktivitas yang didukung dengan penetapan aturan memiliki peluang keberhasilan 1 yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama (Rayner et al. 2021; Arnold 2022). Perspektif tata kelola melihat munculnya standar dan sertifikasi berkelanjutan yang diprakarsai oleh aktor non-negara/swasta sebagai penetapan "aturan baru" dalam produksi pertanian (perusahaan dan LSM). Standar dan sertifikasi telah mengalami proliferasi yang cukup besar di rantai nilai komoditas pertanian (khususnya kopi) selama 20 tahun terakhir. Sebagai mekanisme kunci kemitraan, standar dan sertifikasi memulai fungsi penetapan aturan dengan mengubah koordinasi para aktor (Grabs and Carodenuto 2021; Dietz and Grabs 2022). Koordinasi para aktor dalam model kemitraan merupakan tipe koordinasi berbasis pasar yang bertujuan untuk memecahkan masalah tentang ketidakpastian kualitas produk. Koordinasi berbasis pasar menginternalisasi nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam proses produksi dan perdagangan sehingga meyakinkan konsumen bahwa kopi dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan (Glasbergen 2018). Struktur kelembagaan di rantai nilai kopi saat ini mendukung koordinasi berbasis pasar yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar dan industri (dengan memanfaatkan 1 standar dan sertifikasi) untuk mencapai tujuan bisnis

mereka, seperti pengembangan pasar dan penguatan merek. Dengan demikian, tata kelola rantai nilai kopi yang ada telah berubah menjadi tata kelola rantai nilai baru yang dikoordinasikan dan/atau dikontrol oleh perusahaan besar (Nguyen and Sarker 2018). Perspektif pembangunan sebaliknya melihat bahwa fungsi penetapan aturan melalui standar dan sertifikasi memberikan masalah lain bagi petani. Meskipun standar dan sertifikasi memberikan manfaat (misalnya, mengubah praktik pertanian ke arah yang lebih baik), standar dan sertifikasi tampaknya telah menciptakan hambatan (non-tariff barrier) 1 bagi petani kecil untuk masuk ke pasar ekspor yang lebih menguntungkan (Ibnu et al. 2020). Hambatan bagi petani bersumber dari dua hal, yaitu kurangnya kemampuan (pengetahuan dan keahlian) untuk memenuhi tuntutan (aturan/kriteria) standar dan lemahnya sumber daya (finansial) untuk menutupi biaya sertifikasi. Hasil-hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa standar dan sertifikasi belum berdampak signifikan dan konsisten bagi kesejahteraan ekonomi petani kopi 1 (van Rijsbergen et al. 2016;

 Dietz et al. 2020). Selain itu, terdapat bukti bahwa telah terjadi bias seleksi, yaitu kemitraan memfokuskan dukungan pada golongan petani tertentu yang dianggap mampu memenuhi standar (van Hille et al. 2020). Terkait biaya sertifikasi, hasil-hasil studi sepakat bahwa sertifikasi menimbulkan beban keuangan yang besar pada pengadopsi standar, yaitu petani atau organisasi petani (Glasbergen 2018; Starobin 2021; d'Albertas et al. 2023). Kemitraan tidak selalu mengakomodasi biaya sertifikasi, tetapi petani sendiri yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki sertifikat untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar. Kurangnya dana yang tersedia untuk menutupi biaya sertifikasi menciptakan kesulitan besar bagi organisasi petani (Kangile et al. 2021), dan dalam banyak kasus sertifikasi justru memperkuat ketergantungan mereka pada pihak eksternal, seperti perusahaan-perusahaan eksportir yang membiayai sertifikasi (Fouilleux and Loconto 2017; Bager and Lambin 2020) sehingga petani tidak menerima sertifikat, mereka

hanya menjalankan praktik berdasarkan aturan standar dan sertifikasi jika mereka ingin menjual kopinya ke perusahaan yang membiayai sertifikasi tersebut (Ibnu 2017). Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan (policy implementation) menggambarkan proses penerapan standar dan nilai-nilai berkelanjutan dalam setiap tahapan kegiatan produksi kopi di tingkat petani. Hal tersebut dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen usaha tani untuk meningkatkan kemampuan petani melakukan praktik pertanian yang baik (good agricultural practices) (Ibnu et al. 2018). Sesuai dengan premis teori perubahan, produksi yang berkelanjutan diharapkan dapat dicapai dan selaras dengan permintaan pasar global. Perspektif tata kelola melihat sisi positif kemitraan dalam fungsi implementasi kebijakan, yaitu menghadirkan perubahan teknologi di 1 dalam rantai nilai kopi di negara berkembang, di mana banyak petani tidak memiliki akses ke informasi dan layanan penyuluhan yang memadai (Ibnu et al. 2018; Ibnu 2019; Ibnu 2022). Dengan demikian, kemitraan dianggap dapat memenuhi tugas yang umumnya adalah tanggung jawab pemerintah dan perangkat penyuluhannya. Perspektif pembangunan sebaliknya melihat kemitraan belum dapat melengkapi dan/atau mengombinasikan perubahan berbasis teknologi dengan tipe perubahan yang lebih berpusat pada manusia, seperti penguatan dan/atau pemberdayaan organisasi petani (van Hille et al. 2020). Walaupun kemitraan pada umumnya melibatkan organisasi petani, organisasi petani tidak dapat mempengaruhi secara signifikan proses dan hasil kemitraan. Organisasi petani dianggap sebagai penerima intervensi kemitraan, bukan anggota yang sejajar atau anggota yang “diperhitungkan” dalam kemitraan. Organisasi petani sering kali dipilih oleh inisiator kemitraan berdasarkan hubungan yang sudah ada, dan mereka jarang terlibat dalam perencanaan/desain kemitraan (Navarrete-Cruz et al. 2020). Kemitraan tampaknya telah menyadari situasi sulit organisasi petani (seperti kurangnya sumber daya manusia dan modal) dan sering melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan administrasi bisnis (Ibnu et al. 2018). Namun, fokus kegiatan kemitraan pada pelatihan petani tampaknya belum cukup untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan organisasi petani yang bervariasi dalam tingkat kematangan dan kemampuan

anggota-anggotanya (Grashuis and Skevas 2023). Selain itu, aktor-aktor lain (terutama pemerintah) dari negara-negara produsen kopi kurang terwakili dalam kemitraan, sedangkan aktor-aktor dari negara-negara konsumen (terutama perusahaan multinasional) memiliki posisi yang substansial dan sumber daya yang kuat sehingga mampu memengaruhi desain/arah kemitraan (Barreto Peixoto et al. 2023). 1 Hal ini menyiratkan bahwa kemitraan belum mengekspresikan rekonsiliasi kepentingan yang setara, tetapi lebih merupakan salah satu pendekatan manajerial terhadap tantangan keberlanjutan di dalam rantai nilai kopi (Grabs and Carodenuto 2021). Dengan demikian, kapasitas kemitraan masih terbatas untuk memperkuat posisi aktor lokal (terutama organisasi petani) sebagai salah satu aktor penting dalam rantai nilai kopi. Peningkatan Skala Peningkatan skala (upscaling) mengacu pada perluasan efek kemitraan, di mana pihak-pihak yang lebih mapan (misalnya dalam hal sumber daya dan kemampuan bisnis) terhubung dengan pihak-pihak lainnya yang lebih lemah sehingga dapat memberikan dukungan yang diperlukan (Westermann et al. 2018). Perspektif tata kelola melihat penyebaran informasi merupakan fungsi peningkatan skala yang penting yang berkontribusi pada konvergensi praktik kemitraan sehingga praktik tersebut meluas dan dapat diterima secara umum. Perspektif tata kelola juga menyadari pentingnya jaringan kemitraan dalam rangka perluasan skala. Hal ini belum tampak

 nyata untuk kopi, tetapi telah dilaksanakan untuk kakao misalnya melalui World Cocoa Foundation (WCF). World Cocoa Foundation mengarahkan kemitraan pada tujuan jejaring untuk menopang upaya keberlanjutan dari industri kakao secara keseluruhan (Ingram et al. 2018). Pembentukan jejaring dalam kemitraan hanya dimungkinkan jika masalah persaingan (misalnya, antarskema standar dan sertifikasi) dapat dihindarkan (Glasbergen 2018). Perspektif pembangunan melihat kapasitas kemitraan untuk melakukan fungsi perluasan skala terkendala oleh fokus kegiatan kemitraan pada sertifikasi dan pelaksanaan kegiatan seperti proyek dalam jangka waktu yang terbatas. Fokus pada

sertifikasi dikaitkan dengan beban keuangan yang tinggi bagi organisasi petani sehingga kelompok petani yang menjadi sasaran relatif terbatas (Rich et al. 2018). Sifat seperti proyek dari kegiatan kemitraan tampaknya membatasi kapasitas kemitraan untuk mempromosikan perubahan teknologi dan mengabaikan pentingnya memberdayakan petani kecil dan organisasi mereka agar mampu menentukan sendiri penyerapan dan peningkatan kegiatan kemitraan. Selain itu, pergeseran penyediaan teknologi dari lembaga publik (pemerintah) ke kemitraan (yang dimotori swasta) menimbulkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah dari negara produsen setelah kegiatan kemitraan dihentikan (Casady et al. 2020). Lembaga publik lokal hampir tidak terlibat dalam kemitraan di rantai nilai kopi, sehingga legitimasi dan kapasitas kemitraan masih diragukan dalam hal melembagakan perubahan berkelanjutan yang diinginkan (Ibnu et al. 2018). KAPASITAS KEMITRAAN BERDASARKAN HASIL-HASIL STUDI EMPIRIS TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI Penelitian empiris menunjukkan bahwa alih teknologi dan penerapan praktik pertanian yang baik, yaitu sesuai aturan standar dan sertifikasi, paling tidak memberikan empat manfaat bagi petani. Pertama, penggunaan metode produksi yang lebih baik telah meningkatkan kualitas hasil produksi dan produktivitas kopi petani (Akoyi and Maertens 2018). Kedua, praktik pertanian yang baik telah meningkatkan pengelolaan lingkungan, seperti konservasi sumber daya tanah dan air, penurunan penggunaan pestisida terlarang, dan pemeliharaan hutan lindung (Kangile et al. 2021). Ketiga, kemitraan dianggap telah mampu meningkatkan kondisi kerja di tingkat produksi dan mengesampingkan praktik yang tidak dapat diterima, seperti memperkerjakan anak di bawah umur (Prihandono and Relig 2019). Keempat, sertifikasi dapat meningkatkan pendapatan petani, karena sering dikaitkan dengan pemberian harga premium (Dietz et al. 2021). Namun demikian, adanya beban sertifikasi, termasuk biaya dan risiko keuangan lainnya, menyebabkan manfaat sertifikasi bagi petani sering kali tidak pasti terutama karena kurangnya jaminan tentang harga dan peningkatan akses pasar. Sebagian besar standar dan sertifikasi hanya menawarkan harga premium fleksibel yang dapat dinegosiasikan, terlepas dari berhasil atau tidaknya negosiasi yang terjadi (Wahyudi

et al. 2020). Standar seperti Fairtrade memberikan jaminan harga minimum, tetapi pendekatan ini ditolak oleh 1 sebagian besar skema sertifikasi (Naegele 2020; Bitzer and Schouten 2023). Skema sertifikasi umumnya lebih berorientasi pada pembentukan harga berbasis pasar. Pembentukan harga berbasis pasar menghendaki premi untuk produk bersertifikat didasarkan pada proses dan kualitas produk, kapasitas negosiasi, dan kelangkaan (Bermudez et al. 2022). Dua kriteria terakhir membuat petani sulit menerima premi yang tinggi. Di satu sisi, kapasitas negosiasi petani dan organisasi mereka umumnya sangat terbatas karena kurangnya sumber daya dan keterampilan manajerial. Di sisi lain, kopi bersertifikat cenderung tidak langka (karena telah mengalami kelebihan pasokan), sedangkan standar tidak berfungsi sebagai jaminan untuk meningkatkan akses pasar dalam menghadapi keterbatasan kapasitas pasar untuk menyerap kopi bersertifikat. Pasar kopi bersertifikat baru mencapai sekitar 35% dari pasar kopi dunia (Voora et al. 2019). 1 Hal ini menyiratkan bahwa hanya sebagian petani yang dapat benar-benar menerima manfaat dari kopi bersertifikat yang dihasilkannya. Selain itu, karena pasokan melebihi permintaan, harga premium yang terkait dengan kopi bersertifikat cenderung menurun. Standar dan sertifikasi tampaknya belum menggerakkan redistribusi pendapatan (yang adil dan berpihak pada petani) secara signifikan di sepanjang rantai nilai kopi (Glasbergen 2018). Dengan demikian, hasil-hasil studi (terutama dari perspektif pembangunan) menyiratkan bahwa masih ada setidaknya dua pertanyaan kritis bagi standar dan sertifikasi, yaitu terkait kapasitasnya melakukan perubahan berkelanjutan dan kesesuaiannya sebagai model bisnis bagi petani kecil. Layanan penyuluhan publik untuk petani kopi masih terbatas sehingga petani memiliki pemahaman yang terbatas pula tentang praktik

 pertanian yang baik, organisasi petani yang lemah, dan cenderung menolak perubahan (Glasbergen 2018; Wahyudi et al. 2020). Langkah-langkah untuk memperkuat organisasi petani telah

diterapkan berdasarkan panduan standar tetapi tingkat keberhasilannya tidak merata. Permasalahan terkait organisasi petani agak sulit untuk ditangani karena penyebab masalahnya tidak ditangani, seperti kepemimpinan yang tidak kompeten dan lemahnya motivasi petani untuk berorganisasi (Ibnu et al. 2018). Faktanya, banyak dari organisasi petani yang hanya berstatus “terdaftar” dalam lembaga pemerintah terkait, namun tidak berfungsi dengan baik dan mungkin sulit mencapai kematangan dalam jangka pendek (Wiguna et al. 2019; Elhakim and Leovita 2020). Pemerintah pusat tampaknya lebih memilih pendekatan top-down dalam pembentukan organisasi formal di sektor pertanian (seperti, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) sehingga terkesan agak mengabaikan permasalahan yang terjadi di tingkat daerah, sedangkan pemerintah daerah belum menjadi inisiator dalam pengembangan organisasi petani (Syahyuti et al. 2014). Cita-cita pemberdayaan mungkin menjadi bagian dari retorika kemitraan, tetapi sebagian besar menghilang dalam praktik (Grabs 2020). Semua kekurangan tersebut tampaknya berkontribusi pada lemahnya pemahaman petani tentang konsep keberlanjutan, sehingga standar dan sertifikasi terinternalisasi dengan lemah dalam praktik petani sehari-hari. Hal ini berhubungan erat dengan kenyataan bahwa tingkat adopsi sertifikasi oleh petani kopi Indonesia masih cukup rendah (hanya 7% dari total kopi yang diekspor Indonesia bersertifikat) (Sustainable Coffee Program 2014) dan menunjukkan tren penurunan (kopi bersertifikat dari Indonesia turun 12% pada tahun 2021) (Rainforest Alliance 2022). Standar dan sertifikasi yang didesain dalam konteks global harus berhadapan dengan para petani yang beroperasi pada konteks lokal. Para petani kopi berada dalam ruang lingkup lokal, dimana determinan keputusan petani (farm-gate decision) cukup kompleks, tidak dipengaruhi oleh aspek teknis budi daya semata tetapi dipengaruhi juga oleh pertimbangan ekonomi yang merupakan perpaduan antara variabel onfarm (misalnya, ketersediaan input) dan off-farm (misalnya, keluarga dan pekerjaan sampingan) (Ibnu 2019). Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah petani mulai menjual kopi mereka dalam dua minggu pertama setelah panen ke pengumpul atau pedagang lokal (Ibnu 2017). Pada umumnya petani hanya melakukan pengeringan

seadanya di atas terpal atau lantai jemur tanpa pengolahan lanjutan (pengupasan atau penggilingan). Petani memiliki beberapa alasan, namun secara umum alasan yang diungkapkan adalah untuk mendapatkan penghasilan secara cepat guna memenuhi kebutuhan pokok (Ibnu 2019). Situasi ini merefleksikan bahwa banyak petani tidak terhubung dengan pasar yang lebih menguntungkan yang menyeimbangkan antara kualitas dan harga (Glasbergen 2018). Standar dan sertifikasi global seharusnya dapat membatasi perilaku perusahaan dan memverifikasi kepatuhan mereka terhadap nilainilai keberlanjutan. Namun, implementasi standar dan sertifikasi tampaknya justru menciptakan ketidakseimbangan kekuatan di dalam hubungan baru yang terbentuk antara petani dan perusahaan pembeli besar (Dietz et al. 2021). Selain beroperasi dengan fondasi partisipasi (petani) yang lemah, standar dan sertifikasi global terlihat masih berjuang dengan defisit legitimasi dan akuntabilitas (Lie 2021). Hal tersebut tercermin dari respons negara-negara berkembang, sebagai penghasil produk pertanian, dengan membentuk standar dan sertifikasi nasional (sebagai kontra inisiatif atau inisiatif tandingan) dari standar dan sertifikasi global yang digagas bisnis dan LSM yang berasal dari dunia barat (Ibnu et al. 2020; Marques and Eberlein 2021). Kontra inisiatif ini muncul karena kelompok pemangku kepentingan di negara berkembang tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil standar dan sertifikasi dunia barat (Choiruzzad et al. 2021). Indonesia merupakan salah satu negara terdepan (front-runner) yang menggagas kontra inisiatif ini, terutama melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Indonesian Sustainable Palm Oil telah diterapkan untuk sawit, dan kemudian muncul gagasan tentang ISCoffee (Indonesian Standard Coffee) untuk kopi, dan ISCocoa (Indonesian Standard Cocoa) untuk kakao. Namun demikian, inisiatif tandingan ini tampaknya akan menambah kompleksitas tata kelola di rantai nilai kopi dan masih terdapat keraguan terkait legitimasinya di pasar internasional (Ibnu et al. 2020; Bitzer and Schouten 2023). Saat ini belum ada kepastian tentang penerapan ISCoffee untuk berkompetisi dengan standar global. Pemerintah tampaknya lebih mendorong tumbuhnya sertifikasi kopi berbasis Standar Nasional Indonesia/SNI (seperti sertifikasi organik) dan sertifikasi berbasis ciri

khas wilayah (seperti sertifikasi Indikasi Geografis).

Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 41 No. 2, Desember 2023: 149-165 158 KEBIJAKAN KEMITRAAN : PELAJARAN BAGI TATA KELOLA RANTAI NILAI KOPI DI INDONESIA Hasil-hasil studi empiris yang telah diuraikan di atas dapat ditafsirkan sebagai “konteks disinsentif” implementasi kemitraan melalui standar dan sertifikasi dalam tata kelola rantai nilai kopi di Indonesia. Penafsiran tersebut sejalan dengan fakta bahwa kemitraan adalah perwujudan dari agenda neoliberal. Agenda ini digerakkan oleh motif ekonomi, yaitu efisiensi perusahaan swasta dan solusi berbasis pasar untuk mengakomodasi isu dan/atau masalah sosial dan lingkungan. Kemitraan mencerminkan agenda neoliberal dalam tiga hal. Pertama, kemitraan mencerminkan (dan juga mempromosikan) peningkatan kepentingan bisnis 7 dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini menjadikan kemitraan rentan untuk hanya mewakili kepentingan bisnis dan golongan masyarakat tertentu saja. Kedua, kemitraan (baik langsung maupun tidak langsung) melemahkan peran negara karena pemerintah dari negara-negara produsen kopi hampir tidak terlibat/terwakili dalam kemitraan. Kemitraan berusaha bertindak sebagai agen perubahan berkelanjutan di tingkat global (di pasar internasional) dan lokal (di tingkat petani), tetapi cenderung “menghilang” di tingkat nasional (negara). Usaha-usaha untuk mengecualikan pemerintah nasional dalam model/gagasan pembangun pertanian semakin tampak, karena keputusan penting mengenai komoditas pertanian sering dibuat jauh dari negara produsen komoditas tersebut. Misalnya, harga kopi tidak ditentukan oleh pemangku kepentingan negara produsen tetapi oleh pihak bisnis berdasarkan bursa komoditas di London (kopi Robusta) dan New York (kopi Arabika). Ketiga, kemitraan mewakili pendekatan manajerial untuk memecahkan tantangan keberlanjutan, tercermin dari popularitas standar dan sertifikasi di dalam kemitraan. Namun, standar tidak bersifat netral, melainkan melambangkan praktik sosial baru yang memiliki implikasi ambigu bagi petani dan berfungsi untuk fokus pada isu-isu tertentu (misalnya, perubahan teknologi), namun mengalihkan perhatian dari isu-isu lain (misalnya, penguatan kapasitas negosiasi petani).

Namun demikian, potensi kemitraan tidak bisa begitu saja diabaikan. Dalam kasus spesifik, kemitraan terbukti mampu mendorong petani meningkatkan produksi dan kualitas kopi, meningkatkan sistem tata kelola dalam kelompok petani, menarik layanan pengembangan masyarakat, dan melakukan diversifikasi ke kegiatan kewirausahaan lainnya 11 (Sengere et al. 2019). Secara umum, salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari kemitraan di rantai nilai kopi adalah bahwa wacana kemitraan membuat kemajuan dalam konteks dialog pembangunan sebagai sarana untuk meningkatkan penghidupan masyarakat agraris. Pelajaran lainnya adalah bahwa terdapat faktorfaktor utama yang berkontribusi terhadap kerentanan 1 dalam rantai nilai kopi yang tidak bisa diabaikan(seperti pendidikan yang buruk, kondisi politik dan ekonomi yang kompleks dan tidak stabil di suatu negara, ketidakstabilan pasar dan harga, kurangnya kemampuan perdagangan dan kekuatan negosiasi, asimetri informasi, dan perubahan iklim). Oleh karena itu, daripada fokus pada standar dan sertifikasi, kerja sama dan/atau kemitraan antara bisnis, LSM, dan petani perlu diarahkan pada proyek penciptaan nilai bersama (value co-creation projects) dengan tujuan utama mengatasi kerentanan dan meningkatkan penghidupan (livelihoods) petani dan para pekerja perkebunan kopi (Candelo et al. 2018). Proyek penciptaan nilai bersama berupaya mengatasi kerentanan melalui penggabungan kepentingan (joining of interest) antar-pemangku kepentingan, membangun dialog, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. PENUTUP Kemitraan merupakan respons terhadap berbagai tantangan keberlanjutan yang timbul akibat lemahnya koordinasi pemerintah dan pasar di dalam rantai nilai komoditas pertanian. Perspektif tata kelola umumnya memandang kemitraan memiliki dampak yang positif dan mempunyai kapasitas sebagai inisiator dan agen perubahan di sepanjang rantai nilai, khususnya kopi. Perspektif pembangunan, sebaliknya menganggap kemitraan memiliki kapasitas yang lemah dalam hal mempromosikan perubahan yang berkelanjutan karena hanya fokus pada perubahan yang bersifat parsial. Dampak kemitraan (standar dan sertifikasi) masih ambigu terutama dalam hal pemberdayaan petani kecil, baik dalam hal ekonomi maupun terkait organisasi. 1 Studi-

studi dalam untaian literatur pembangunan pada umumnya masih meragukan kapasitas kemitraan dalam membawa perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan yang berbeda tentang kapasitas kemitraan tersebut terkait dengan fakta bahwa kemitraan adalah perwujudan dari agenda neoliberal. Motif agenda neoliberal menyiratkan bahwa kemitraan menggunakan pandangan

PENINGKATAN KAPASITAS KEMITRAAN UNTUK MENDORONG RANTAI NILAI KOMODITAS KOPI YANG BERKELANJUTAN Muhammad Ibnu 159 pragmatis dalam mengajar perubahan berkelanjutan. Namun, pandangan ini menjadikan kemitraan justru belum mampu sepenuhnya menangkap sifat kondisional dan kontekstual dari pembangunan pertanian. Kemitraan secara teori mungkin tidak keliru, namun secara nyata belum cukup berkontribusi dalam memberikan solusi bagi berbagai kesenjangan di struktur rantai nilai komoditas pertanian, khususnya kopi. Dengan demikian, rekonseptualisasi kemitraan dan asumsi yang mendasarinya adalah suatu hal yang perlu dilakukan, terutama untuk mengubah cara kemitraan membangun hubungan antara bisnis dan pelaku pembangunan pertanian lainnya terutama petani dan pemerintah. Implikasinya adalah kemitraan perlu mengadopsi model bisnis yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama aktor-aktor dari negara produsen kopi. Kemitraan perlu dibangun dengan perspektif bottom-up, yang mempertimbangkan situasi dan konteks lokal, daripada menekankan pendekatan manajerial yang fokus pada bagaimana menjalankan dan memperluas kemitraan. Selain itu, partisipasi dalam standar dan sertifikasi perlu dipermudah bagi petani, karena beragamnya skema sertifikasi telah menyebabkan kebingungan petani. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis bagaimana standar dan sertifikasi yang berbeda dapat diharmonisasi sehingga terbentuk satu set standar yang disepakati secara internasional. Studi selanjutnya juga perlu mengeksplorasi bagaimana kemitraan yang digagas oleh pemangku kepentingan kopi nasional (seperti ISCofee, ISCocoa, dan ISPO) dapat memiliki legitimasi yang lebih kuat di dunia internasional. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-

rekan Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, terutama Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., Dr. Ir. Hanung Ismono, M.P., dan Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. yang telah memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA 4C Association. 2019. Langkah demi langkah 4C: jalan untuk bergabung dengan sistem 4C. [diunduh 2023 Juli 14]. Tersedia dari: https://www.4c-services.org/wp-content/uploads/2022/01/4C-UnitCertification_Step-by-Step_ID.pdf. Akoyi KT, Maertens M. 2018. Walk the talk: private sustainability standards in the Ugandan coffee sector. J Dev Stud [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 54(10):1792–1818. Available from: https://lirias. kuleuven.be/retrieve/524942. doi:10.1080/ 00220388.2017.1327663. Alexander R. 2020. Emerging roles of lead buyer governance for sustainability across global production networks. J Bus Ethics [Internet]. [cited 2024 Jan 12]; 162(2):269–290. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s105 51-019-04199-4.pdf. doi:10.1007/s10551-01904199-4. Arnold N. 2022. Accountability in transnational governance: the partial organization of voluntary sustainability standards in long-term accountgiving. Regul Gov [Internet]. [cited 2024 Jan 06]; 16(2):375–391. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/re go.12357. doi:10.1111/rego.12357. Arslan A, Golgeci I, Khan Z, Al-Tabbaa O, HurmelinnaLaukkanen P. 2021. Adaptive learning in crosssector collaboration during global emergency: conceptual insights in the context of COVID-19 pandemic. Multinatl Bus Rev [Internet]. [cited 2024 Jan 28]; 29(1):21–42. Available from: https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/130 45/Osuva_Arslan_Golgeci_Khan_Al-Tabbaa_ Hurmelinna-Laukkanen_2021.pdf?sequence=2& isAllowed=y. doi:10.1108/MBR-07-2020-0153. Bager SL, Lambin EF. 2020. Sustainability strategies by companies in the global coffee sector. Bus Strateg Environ [Internet]. [cited 2024 Jan 27]; 29(8):3555–3570. Available from: doi:10.1002/bse. 2596. Barreto Peixoto JA, Silva JF, Oliveira MBPP, Alves RC. 2023. Sustainability issues along the coffee chain: From the field to the cup. Compr Rev Food Sci Food Saf [Internet]. [cited 2024 March 22]; 22(1):287–332. Available from: doi:10.1111/15414337.13069. Barzola Iza CL, Dentoni D, Omta OSWF. 2020. The

influence of multi-stakeholder platforms on farmers' innovation and rural development in emerging economies: a systematic literature review. J Agribus Dev Emerg Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 14]; 10(1):13–39. Available from: doi:10.1108/ JADEE-12-2018-0182. Bermudez S, Vivek Voora V, Larrea C, Voora V, Larrea C. 2022. Global market report: coffee prices and sustainability [Internet]. [cited 2024 Jan 24]; Winnipeg (Canada): 17 International Institute for Sustainable Development (IISD). Available from: http://www.jstor.org/stable/resrep47318. Birkland TA, Schwaeble KL. 2019. Agenda setting and the policy process: focusing events [Internet]. [cited 2024 Jan 24]; Oxford Res Encycl Polit. Available from: https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/

acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore9780190228637-e-165. 6 Bitzer V, Glasbergen P. 2015. Business–NGO partnerships in global value chains: part of the solution or part of the problem of sustainable change? Curr Opin Environ Sustain [Internet]. [cited 2024 Jan 20]; 12:35–40. Available from: https://www.conservationfinancealliance.org/s/Bus iness-NGOs_ENG.pdf Bitzer V, Glasbergen P, Arts B. 2013. 3 Exploring the potential of intersectoral partnerships to improve the position of farmers in global agrifood chains: findings from the coffee sector in Peru. Agric Human Values [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 30(1):5–20. Available from: https://link.springer. com/article/10.1007/s10460-012-9372-z. doi: 10. 1007/s10460-012-9372-z. Bitzer V, Schouten G. 2023. Out of balance: Global– local tensions in multi-stakeholder partnerships and the emergence of rival initiatives in producing countries. Organ Environ [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 36(3):387–410. doi: 10.1177/ 10860266221117231. Brun A, Karaosman H, Barresi T. 2020. Supply chain collaboration for transparency. Sustain [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 12(11):4429. Available from: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4429/pdf. doi:10.3390/su12114429. Calton JM. 2011. Global action networks: creating our future together. Sustain Accounting, Manag Policy J [Internet]. [cited 2024 Jan 16]; 2(1):175–180.

Available from: https://www.emerald.com/insight/ content/doi/10.1108/20408021111162218/full/html . doi:10.1108/20408021111162218. Candelo E, Casalegno C, Civera C, Mosca F. 2018. Turning farmers into business partners through value co-creation projects. Insights from the Coffee Supply Chain. Sustainability [Internet]. [cited 2024 Jan 16]; 10(4). Available from: https://www.mdpi. com/2071-1050/10/4/1018/pdf. doi:10.3390/ su10041018. Carroll AB, Brown JA. 2018. Corporate social responsibility: A review of current concepts, research, and issues. Corp Soc Responsib [Internet]. [cited 2024 Jan 17]; 2:39–69. Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/ 10.1108/S2514-17592018000002002/full/html. doi:10.1108/S2514-175920180000002002. Casady CB, Eriksson K, Levitt RE, Scott WR. 2020. (Re) defining public-private partnerships (PPPs) in the new public governance (NPG) paradigm: an institutional maturity perspective. Public Manag Rev [Internet]. [cited 2024 Jan 18]; 22(2):161–183. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/ full/10.1080/14719037.2019.1577909?scroll=top& needAccess=true. doi:10.1080/14719037.2019. 1577909 Cashore B, Knudsen JS, Moon J, van der Ven H. 2021. Private authority and public policy interactions in global context: governance spheres for problem solving. Regul Gov [Internet]. [cited 2024 Jan 14]; 15(4):1166–1182. Available from: https://research. cbs.dk/files/71094780/benjamin_cashore_et_al_pr ivate_authority_and_public_policy_interactions_in _global_context_acceptedversion.pdf. doi:10.1111/rego.12395. Choiruzzad SAB, Tyson A, Varkkey H. 2021. The ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil certification: internal incoherence, governance rescaling and state transformation. Asia Eur J [Internet]. [cited 2024 Jan 13]; 19(2):189–208. Available from: https://link.springer.com/content/ pdf/10.1007/s10308-020-00593-0.pdf. doi:10.1007/s10308-020-00593-0. d'Albertas F, Ruggiero P, Pinto LFG, Sparovek G, Metzger JP. 2023. Agricultural certification as a complementary tool for environmental law compliance. Biol Conserv [Internet]. [cited 2024 Jan 11]; 277:109847. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/

pii/S0006320722004001. doi: 10.1016/j.biocon. 2022.109847. Delmas MA, Gergaud O. 2021. Sustainable practices and product quality: is there value in eco-label certification? the case of wine. Ecol Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 10]; 183:106953. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S0921800921000112. doi: 10.1016/j.ecolecon. 2021.106953. Dentoni D, Bitzer V, Schouten G. 2018. Harnessing wicked problems in multi-stakeholder partnerships. J Bus Ethics [Internet]. [cited 2024 Jan 28]; 150(2):333–356. Available from: https://link. springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-0183858-6.pdf. doi:10.1007/s10551-018-3858-6. Dietz T, Estrella Chong A, Grabs J, Kilian B. 2020. 5 How effective is multiple certification in improving the economic conditions of smallholder farmers? evidence from an impact evaluation in Colombia's coffee belt. J Dev Stud [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 56(6):1141–1160. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0022 0388.2019.1632433?scroll=top&needAccess=true . doi:10.1080/00220388.2019.1632433. Dietz T, Grabs J. 2022. Additionality and implementation gaps in voluntary sustainability standards. New Polit Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 23]; 27(2):203–224. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1356 3467.2021.1881473?scroll=top&needAccess=true . doi:10.1080/13563467.2021.1881473. Dietz T, Grabs J, Chong AE. 2021. 15 Mainstreamed voluntary sustainability standards and their effectiveness: evidence from the Honduran coffee sector. Regul Gov [Internet]. [cited 2024 Jan 23]; 15(2):333–355. Available from: https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/rego.122 39. doi:10.1111/rego.12239. Doh JP, Tashman P, Benischke MH. 2019. 22 Adapting to grand environmental challenges through collective entrepreneurship. Acad Manag Perspect [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 33(4):450–468.

 Available from: https://journals.aom.org/doi/abs/ 10.5465/amp.2017.0056. doi:10.5465/amp.2017. 0056.

Elhakim SK, Leovita A. 2020. Model penguatan kelembagaan asosiasi kopi Minang Sumatera Barat menuju manajemen inovasi dalam memperkuat kearifan lokal. J Agrimanex Agribusiness, Rural Manag Dev Ext [Internet]. [disitasi 2024 Jan 20]; 1(1). Tersedia dari: https://journal.unsika.ac.id/index.php/agrimanex/ar ticle/download/4751/2560 Fischer EF, Victor B, Asturias de Barrios L. 2021. Quality versus solidarity: third wave coffee and cooperative values among smallholding Maya farmers in Guatemala. J Peasant Stud [Internet]. [cited 2024 Jan 03]; 48(3):640–657. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/030 66150.2019.1694511. doi:10.1080/03066150. 2019.1694511. Florini A, Pauli M. 2018. Collaborative governance for the sustainable development goals. Asia Pacific Policy Stud [Internet]. [cited 2024 Feb 22]; 5(3):583–598. Available from: https://onlinelibrary. wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/app5.252. doi:10.1002/app5.252. Fouilleux E, Loconto A. 2017. Voluntary standards, certification, and accreditation in the global organic agriculture field: a tripartite model of technopolitics. Agric Human Values [Internet]. [cited 2024 Feb 22]; 34(1):1–14. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10460016-9686-3. doi:10.1007/s10460-016-9686-3. Gallo PJ, Sosa S, Velez-Calle A. 2023. Business for peace: How entrepreneuring contributes to Sustainable Development Goal 16. BRQ Bus Res Q [Internet]. [cited 2024 Feb 21]; 26(1):62–78. Available from: https://journals.sagepub. com/doi/pdf/10.1177/23409444221118097. doi: 10.1177/23409444221118097. Gather J, Wollni M. 2022. Setting the standard: Does rainforest alliance certification increase environmental and socio-economic outcomes for small-scale coffee producers in Rwanda? Appl Econ Perspect Policy [Internet]. [cited 2024 Feb 24]; 44(4):1807–1825. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.100 2/aepp.13307. doi:10.1002/aepp.13307. Glasbergen P. 2018. Smallholders do not eat certificates. Ecol Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 08]; 147:243–252. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S 0921800917314520. doi: 10.1016/j.ecolecon. 2018.01.023. Global Coffee Platform/GCP.

1 2017. 4C Baseline common code v.2.1 [Internet]. [cited 2024 Jan 18]; Available from: http://www.globalcoffeeplatform. org/assets/files/GCP_Doc_01_Baseline-CommonCode_v2.1_en.pdf. Grabs J. 2020. Assessing the institutionalization of private sustainability governance in a changing coffee sector. Regul Gov [Internet]. [cited 2024 Jan 02]; 14(2):362–387. Available from: https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rego.1221 2. doi:10.1111/rego.12212. Grabs J, Carodenuto SL. 2021. Traders as sustainability governance actors in global food supply chains: a research agenda. Bus Strateg Environ [Internet]. [cited 2024 Jan 20]; 30(2):1314– 1332. Available from: https://onlinelibrary.wiley. com/doi/abs/10.1002/bse.2686. doi:10.1002/bse.2686. Grashuis J, Skevas T. 2023. What is the benefit of membership in farm producer organizations? the case of 3 coffee producers in Peru. Ann Public Coop Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 21]; 94(2):423– 443. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/apce.12390. Di Gregorio M, Fatorelli L, Paavola J, Locatelli B, Pramova E, Nurrochmat DR, May PH, Brockhaus M, Sari IM, Kusumadewi SD. 2019. Multi-level governance and power in climate change policy networks. Glob Environ Chang [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 54:64–77. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S 0959378018304242. doi: 10.1016/j.gloenvcha. 2018.10.003. Hahn T, Pinkse J, Preuss L, Figge F. 2015. Tensions in corporate sustainability: 3 towards an integrative framework. J Bus Ethics [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 127(2):297–316. Available from: https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/63990/1/JBE _2015_Framework_Tensions_Final.pdf. doi:10.1007/s10551-014-2047-5. Hajjar R, Newton P, Adshead D, Bogaerts M, MaguireRajpaul VA, Pinto LFG, McDermott CL, Milder JC, Wollenberg E, Agrawal A. 2019. Scaling up sustainability in commodity agriculture: transferability of governance mechanisms across the coffee and cattle sectors in Brazil. J Clean Prod [Internet]. [cited 2024 Jan 23]; 206:124–132. Available from: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0959652618328221. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.09.102. Hermans F, Geerling-Eiff F, Potters J, Klerkx L. 2019. Public-private partnerships as systemic

agricultural innovation policy instruments – assessing their contribution to innovation system function dynamics. NJAS - Wageningen J Life Sci [Internet]. [cited 2024 Jan 24]; 88:76–95. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S 1573521418300332. doi: 10.1016/j.njas.2018.10. 001. van Hille I, de Bakker FGA, Ferguson JE, Groenewegen P. 2019. Navigating tensions in a cross-sector social partnership: how a convener drives change for sustainability. Corp Soc Responsib Environ Manag [Internet]. [cited 2024 Jan 25]; 26(2):317–329. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/csr. 1684. doi:10.1002/csr.1684. van Hille I, de Bakker FGA, Ferguson JE, Groenewegen P. 2020. Cross-sector partnerships

 for sustainability: how mission-driven conveners drive change in national coffee platforms. Sustain [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 12(7):2846. Available from: https://www.mdpi.com/20711050/12/7/2846/pdf. doi:10.3390/su12072846. Hodge GA, Greve C. 2017. On public–private partnership performance: A contemporary review. Public Work Manag Policy [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 22(1):55–78. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/108 7724X16657830 Horner R. 2020. Towards a new paradigm of global development? beyond the limits of international development. Prog Hum Geogr [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 44(3):415–436. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/030 9132519836158 Humphreys D, Singer B, Lawlor K, Smith R, Budds J, Gabay M, Bhagwat S, de Jong W, Newing H, Cross C, et al. 2019. SDG 17: partnerships for the goalsfocus on forest finance and partnerships. Sustain Dev Goals Their Impacts for People [Internet]. [cited 2024 Jan 10]; 541–576. Available from: https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/72245/1/sdg _17_partnerships_for_the_goals_focus_on_forest _finance_and_partnerships.pdf. doi:10.1017/9781108765015.019. Ibnu M. 2017. Gatekeepers of Sustainability: on coffee smallholders, standards and certifications in Indonesia [Dissertation]. [Maastricht (ND)]: Maastricht University. Ibnu M. 2019. Determinan partisipasi petani kopi dalam 1 standar

dan sertifikasi berkelanjutan Common Code for Coffee Community (4C). J Tanam Ind dan Penyegar [Internet]. [disitasi 2023 Des 22]; 6(3):135. Tersedia dari: http://repository.lppm.unila.ac.id/17678/. doi:10.21082/jtidp. v6n3.2019.p135-144. Ibnu M. 2022. A systemic approach for a sustainable coffee production in Indonesia. SOCA J Sos Ekon Pertan [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 16(1):15. Available from: http://repository.lppm.unila.ac.id/ 42364/1/SOCA.pdf. doi:10.24843/soca.2022.v16. i01.p02. Ibnu M, Offermans A, Glasbergen P. 2018. Certification and farmer organisation: Indonesian smallholder perceptions of benefits. Bull Indones Econ Stud [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 54(3):387–415. Available from: https://www. tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00074918.2018.1 506093. doi:10.1080/00074918.2018.1506093. Ibnu M, Offermans A, Glasbergen P. 2020. Toward a more sustainable coffee production. Pelita Perkeb (a Coffee Cocoa Res Journal) [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 35(3):212–229. Available from: https://mail.ccrjournal.com/index.php/ccrj/article/d ownload/361/391 doi: 10.22302/iccri.jur. pelitaperkebunan.v35i3.361. Ingram V, van Rijn F, Waarts Y, Gilhuis H. 2018. The impacts of cocoa sustainability initiatives in West Africa. Sustain [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 10(11):4249. Available from: https://www.mdpi. com/2071-1050/10/11/4249/pdf. doi:10.3390/su10114249. Islam MA, Deegan C, Haque S. 2021. Corporate human rights performance and moral power: a study of retail MNCs' supply chains in Bangladesh. Crit Perspect Account [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 74:102163. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S1045235420300162. doi: 10.1016/j.cpa.2020.102163 de Janvry A, Sadoulet E. 2020. Using agriculture for development: supply-and demand-side approaches. World Dev [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 133:105003. Available from: https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030575 0X20301297. doi: 10.1016/j.worlddev.2020. 105003 Kangile JR, Kadigi RMJ, Mgeni CP, Munishi BP, Kashaigili J, Munishi PKT. 2021. Dynamics of coffee certifications in producer countries: reexamining the tanzanian status, challenges and impacts on livelihoods and

environmental conservation. Agric [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 11(10):931. Available from: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/10/931/pdf. doi:10.3390/agriculture11100931. Koopmans ME, Rogge E, Mettepenningen E, Knickel K, Šūmane S. 2018. The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. J Rural Stud [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 59:252–262. Available from: https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S074301671630211X. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.03.012. KPMG Sustainability. 2013. Improving smallholder livelihoods: Effectiveness of certification in coffee, cocoa and cotton [Internet]. [cited 2024 Feb 22]; Sustaineo, Germany. Available from: http://s2pkp.fp.unila.ac.id/wp-content/uploads/ 2019/04/Improving-smallholder-livelihoodsEffectiveness-of-certification-in-coffeecocoa-andcotton_study-commissioned-by-SUSTAINEO.pdf Lambin EF, Thorlakson T. 2018. Sustainability standards: Interactions between private actors, civil society, and governments. Annu Rev Environ Resour [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 43:369–393. Available from: https://www.annualreviews.org/ content/journals/10.1146/annurev-environ102017-025931. doi:10.1146/annurev-environ102017-025931. Langford NJ. 2019. The governance of social standards in emerging markets: an exploration of actors and interests shaping trustea as a Southern multi-stakeholder initiative. Geoforum [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 104:81–91. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S0016718519301964. doi: 10.1016/j.geoforum. 2019.06.009. Lie AL. 2021. ‘We are not a partnership’–constructing and contesting legitimacy of global public–private

 partnerships: the Scaling Up Nutrition (SUN) movement. Globalizations [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 18(2):237–255. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1474 7731.2020.1770038. doi:10.1080/14747731.2020. 1770038. Marques JC, Eberlein B. 2021. Grounding transnational business governance: a politicalstrategic perspective on

government responses 2 in the Global South. Regul Gov [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 15(4):1209–1229. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rego.12356. doi:10.1111/rego.12356. Martel A, Reilly-King F, Baruah B. 2021. Next generation of knowledge partnerships for global development. Introduction / Prochaine génération de partenariat de savoir pour le développement global. Introduction. Can J Dev Stud [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 42(3):253–273. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0225 5189.2021.1919065. doi:10.1080/02255189.2021.1919065. Martos-Pedrero A, Cortés-García FJ, Jiménez-Castillo D. 2019. The relationship between social responsibility and business performance: an analysis of the agri-food sector of southeast Spain. Sustain [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 11(22):6390. Available from: https://www.mdpi. com/2071-1050/11/22/6390/pdf. doi:10.3390/su11226390. Marx A. 2019. Public-private 4 partnerships for sustainable development: exploring their design and its impact on effectiveness. Sustain [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 11(4):1087. Available from: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1087/pdf. doi:10.3390/su11041087. McHugh MC, Harvey JB, Aseyev D, Alexander JA, Beich J, Scanlon DP. 2012. Approaches to improving healthcare delivery by multi-stakeholder alliances. Am J Manag Care [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 18(6 Suppl): S156. Available from: http://ajmc.s3.amazonaws.com/_media/_pdf/A413 _12sep_McHugh_S156to62.pdf Morisson A, Doussineau M. 2019. Regional innovation governance and place-based policies: design, implementation and implications. Reg Stud Reg Sci [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 6(1):101–116. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21681376.2019.1578257. doi:10.1080/21681376.2019.1578257. Mousavi S, Bossink B. 2020. Corporate-NGO 4 partnership for environmentally sustainable innovation: lessons from a cross-sector collaboration in aviation biofuels. Environ Innov Soc Transitions [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 34:80–95. Available from: https://research.vu.nl/ files/229573774/Corporate_NGO_partnership_for _environmentally_sustainable_innovation.pdf Naegele H. 2020. Where does the fair trade

money go? how much consumers pay extra for fair trade coffee and how this value is split along the value chain. World Dev [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 133:105006. Available from: https://www.econstor. eu/bitstream/10419/191910/1/1048609618.pdf. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105006. Navarrete-Cruz A, Birkenberg A, Birner R. 2020. Factors influencing the development of rural producer organizations in post-war settings. The case of coffee growers associations in Southern Tolima, Colombia. Int J Commons [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 14(1). Available from: https://thecommonsjournal.org/articles/10.5334/ijc. 1028.doi: 10.5334/ijc.1028. Nguyen GNT, Sarker T. 2018. Sustainable coffee supply chain management: a case study in Buon Me Thuot City, Daklak, Vietnam. Int J Corp Soc Responsib [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 3(1):1– 17. Available from: https://link.springer.com/ content/pdf/10.1186/s40991-017-0024-x.pdf. doi:10.1186/s40991-017-0024-x. OECD. 2007. Promoting pro-poor growth. Agriculture [Internet]. [cited 2024 Jan 05]; Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, Paris. Available from: https://www.oecd.org/ greengrowth/green-development/43514554.pdf Parker DW, Dressel U, Chevers D, Zeppetella L. 2018. Agency theory perspective on public-privatepartnerships: international development project. Int J Product Perform Manag [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 67(2):239–259. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/478627387.pdf. doi:10.1108/IJPPM-09-2016-0191. Partzsch L, Hartung K, Lümmen J, Zickgraf C. 2021. Water in your coffee? accelerating SDG 6 through voluntary certification programs. J Clean Prod [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 324:129252. Available from: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0959652621034387. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129252. Pattberg P, Biermann F, Chan C, Mert A. 2012. Publicprivate partnerships for sustainable development: emergence, influence and legitimacy. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing. Paunov C, Planes-Satorra S. 2019. How are digital technologies changing innovation? evidence from agriculture, the automotive industry and retail. Oecd Sci Technol Ind Policy Pap [Internet]. [cited 2024 Jan 11]; Nr. 74(74):1–53. Available from:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/67bbcafeen.pdf?expires=1667737958&id=id&accname=guest&checksum=7CAF3454B84F5ED7C3E426B8E FF0EB35. Pfisterer S, Van Tulder R. 2021. Governing partnerships for development in post-conflict settings: evidence from a longitudinal case study in Colombia. Bus Ethics, Environ Responsib [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 30(S1):44–60. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/beer.12278. doi: 10.1111/beer. 12278. Prihandono I, Relig FH. 2019. International certification as a mechanism for protecting the human rights of

 Indonesian coffee farmers. Environ Policy Law [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 49(1):49–54. Available from: https://heinonline.org/hol-cgibin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/envpola49&section=15. doi:10.3233/EPL-190125. Pronti A, Coccia M. 2020. Agroecological and conventional agricultural systems: comparative analysis of coffee farms in Brazil for sustainable development. Int J Sustain Dev [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 23(3–4):223–248. Available from: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSD.2020.115223. doi:10.1504/IJSD.2020.115223. Rainforest Alliance. 2022. Laporan data sertifikasi kopi 2021 [Internet]. [cited 2024 March 21]; Available from: https://www.rainforest-alliance.org/id/ resource-item/laporan-data-sertifikasi-kopi-2021/. Rayner T, Oberthür S, Hermwille L. 2021. A sectoral perspective on international climate governance: key findings and research priorities. Earth Syst Gov [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 8:100105. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589811621000094. doi: 10.1016/j.esg.2021.100105. Renard MC. 2022. Values 2 and the making of standards in ‘sustainable’ coffee networks: the case of 4C and Nestlé in México. Int Sociol [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 37(6):758–776. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026 85809221119289. doi:10.1177/02685809221119289. Rich KM, Chengappa PG, Muniyappa A, Yadava CG, Manjyapura GS, Pradeepa Babu BN, Shubha YC, Rich M. 2018. Coffee certification in India:

awareness, practices, and sustainability perception of growers. Agroecol Sustain Food Syst [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 42(4):448–474. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/216 83565.2017.1361497. doi:10.1080/21683565. 2017.1361497. 1 van Rijsbergen B, Elbers W, Ruben R, Njuguna SN. 2016. The ambivalent impact of coffee certification on farmers' welfare: a matched panel approach for cooperatives in Central Kenya. World Dev [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 77:277–292. Available from: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0305750X15002028. doi: 10.1016/j.worlddev.2015.08.021. Dos Santos RB, Torrisi NM, Pantoni RP. 2021. Third party certification of agri-food supply chain using smart contracts and blockchain tokens. Sensors [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 21(16):5307. Available from: https://www.mdpi.com/14248220/21/16/5307?trk=public_post_comment-text. doi:10.3390/s21165307. Sapkota P, Keenan RJ, Ojha HR. 2018. Community institutions, social marginalization and the adaptive capacity: 1 a case study of a community forestry user group in the Nepal Himalayas. For Policy Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 92:55–64. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S1389934116304543. doi: 10.1016/ j.forpol.2018.04.001. Seitanidi M, Crane A, Novak R. 2013. Social partnerships and responsible business: What, why and how? in social partnerships and responsible business (pp. 1-12). London (UK): Routledge. Selsky JW, Parker B. 2005. Cross-sector partnerships to address social issues: Challenges to theory and practice. J Manage [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 31(6):849–873. Available from: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1 &type=pdf&doi=f287d2d739ecd4ee7ac8c41fc0d8 325a26360ef. doi:10.1177/0149206305279601. 11 Sengere RW, Curry GN, Koczberski G. 2019. Forging alliances: Coffee grower and chain leader partnerships to improve productivity and coffee quality in Papua New Guinea. Asia Pac Viewp [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 60(2):220–235. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ abs/10.1111/apv.12222. doi:10.1111/apv.12222. Shelton AM, Hossain MJ, Paranjape V, Azad AK, Rahman ML,

Khan ASMMR, Prodhan MZH, Rashid MA, Majumder R, Hossain MA, et al. 2018. Bt eggplant project in Bangladesh: history, present status, and future direction. Front Bioeng Biotechnol [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 6(AUG):106. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2 018.00106/full?&utm. doi:10.3389/fbioe.2018.00106. Silva ME, Dias GP, Gold S. 2020. Exploring the roles of lead organisations in spreading sustainability standards throughout food supply chains in an emerging economy. Int J Logist Manag [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 32(3):1030–1049. Available from: https://www.ufpi.br/arquivos_download/ arquivos/PICOS/Silva_Dias_and_Gold_2020.pdf. doi:10.1108/IJLM-05-2020-0201. Starobin SM. 2021. Credibility beyond compliance: Uncertified smallholders in sustainable food systems. Ecol Econ [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 180:106767. Available from: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0921800918315969. doi:10.1016/j.ecolecon.2020.106767. Stephenson PJ, Bakarr M, Bowles-Newark N, Kleinschroth F, Mapendembe A, Ntiamoa-Baidu Y, Obura D, Ratsifandrihamanana N, Simaika J, Sitati N, et al. 2021. Conservation science in Africa: mainstreaming biodiversity information into policy and decision-making. Closing KnowledgeImplementation Gap Conserv Sci Interdiscip Evid Transf Across Sect Spat Scales [Internet]. [cited 2023 Dec 22]; 287–321. Available from: doi:10.1007/978-3-030-81085-6_11. Sustainable Coffee Program. 2014. 1 Indonesia a business case for sustainable coffee production [Internet]. [cited 2023 Dec 27]; Available from: http://www.sustainablecoffeeprogram.com/en/reso urces.

 Syahyuti SW, Suhaeti RN, Zakaria AK, Nurasa T. 2014. Kajian peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Tian Z, Wang JW, Li J, Han B. 2021. Designing future crops: challenges and strategies for sustainable agriculture. Plant J [Internet]. [cited 2024 Jan 22];

105(5):1165–1178. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.111 1/tpj.15107. doi:10.1111/tpj.15107. Vestergaard A, Langevang T, Morsing M, Murphy L. 2021. Partnerships for development: assessing the impact potential of cross-sector partnerships. World Dev [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 143:105447. Available from: https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2 1000590. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105447. Voora V, Bermúdez S, Larrea C. 2019. Global market report: coffee [Internet]. [cited 2024 Feb 12]; Winnipeg (Can): 17 International Institute for Sustainable Development (IISD). Available from: https://www.iisd.org/system/files/publications/ssiglobal-market-report-coffee.pdf Wahyudi A, Wulandari S, Aunillah A, Alouw JC. 2020. Sustainability certification as a pillar to promote Indonesian coffee competitiveness. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; Vol. 418. IOP Publishing. p. 12009. Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/418/1/012009/pdf. Wang H, Xiong W, Wu G, Zhu D. 2018. Public–private partnership in public administration discipline: a literature review. Public Manag Rev [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 20(2):293–316. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1471 9037.2017.1313445. doi:10.1080/14719037.2017. 1313445. Werhane PH, Newton LH, Wolfe R. 2020. Alleviating poverty through profitable partnerships: Globalization, markets, and economic well-being. London (UK): Routledge. Westermann O, Förch W, Thornton P, Körner J, Cramer L, Campbell B. 2018. Scaling up agricultural interventions: Case studies of climatesmart agriculture. Agric Syst [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 165:283–293. Available from: https://cgspace.cgiar.org/bitstreams/d7021a330240-4323-9070-cc95cf93d619/download. doi: 10.1016/j.agsy.2018.07.007. Wiguna S, Karimi S, Ridwan E. 2019. 1 Dampak skema relasi kopi sebagai pengembangan perekonomian petani kopi di pedesaan. Agriekonomika [Internet]. [disitasi 2024 Jan 22]; 8(1):93–103. Tersedia dari: https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/articl e/download/5027/3556 Witte JM, Reinicke WH, Benner T. 2017. Beyond multilateralism: global public policy networks. In

Challenges of globalization (pp. 109-128). London (UK): Routledge. 3 World Bank. 2007. World development report 2008: Agriculture for development [Internet]. [cited 2024 Feb 14]; Rome: The World Bank. Available from: https://elibrary.worldbank.org/doi/epdf/10.1596/97 8-0-8213-6807-7 doi:10.1596/978-0-8213-6807-7 Zhan JX. 2 2021. GVC transformation and a new investment landscape in the 2020s: Driving forces, directions, and a forward-looking research and policy agenda. J Int Bus Policy [Internet]. [cited 2024 Jan 22]; 4(2):206–220. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s422 14-020-00088-0.pdf. doi:10.1057/s42214-02000088-0.

Sources

1	https://www.academia.edu/87419297/Standar_dan_Sertifikasi_Berkelanjutan_Sustainability_Standards_and_Certification_SSC_Sebuah_Tinjauan_dari_Sudut_Pandang_Petani_kopi_Indonesia INTERNET 1%
2	https://link.springer.com/article/10.1057/s42214-021-00117-6 INTERNET 1%
3	https://www.academia.edu/109955497/Exploring_the_potential_of_intersectoral_partnerships_to_improve_the_position_of_farmers_in_global_agrifood_chains_findings_from_the_coffee_sector_in_Peru INTERNET <1%
4	https://www.cambridge.org/core/books/transforming-food-systems-under-climate-change-through-innovation/partnerships-to-achieve-impact/3D014035294D3710E39DEDD777900904 INTERNET <1%
5	https://www.tandfonline.com/toc/fjds20/56/6?nav=tocList INTERNET <1%
6	https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/business-ngo-partnerships-in-global-value-chains-part-of-the-solu INTERNET <1%
7	https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/315-lsm-indonesia-sekarang-bisa-akses-dana-pemerintah-untuk-pelayanan-masyarakat INTERNET <1%
8	https://savana-cendana.id/index.php/AG/article/download/2052/682/ INTERNET <1%
9	https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-0839/vol/10/iss/1 INTERNET <1%
10	https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Siti-Khairani-Elhakim-2189885533 INTERNET <1%
11	https://pacificlivelihoods.com/2021/04/29/a-revived-png-coffee-journal/ INTERNET <1%
12	https://research.cbs.dk/files/71094780/benjamin_cashore_et_al_private_authority_and_public_policy_interactions_in_global_context_acceptedversion.pdf INTERNET <1%
13	https://www.researchgate.net/publication/372954184_Kategori_Studi_dan_Kesenjangan_Pengetahuan_di_Literatur_Standar_dan_Sertifikasi_Kopi_Berkelanjutan INTERNET

<1%

14	https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02685809221133055 INTERNET <1%
15	https://www.semanticscholar.org/paper/Mainstreamed-voluntary-sustainability-standards-and-Dietz-Grabs/f88553803ac908968811702e8af83e5cd76838eb INTERNET <1%
16	https://aura.abdn.ac.uk/handle/2164/15513 INTERNET <1%
17	https://www.iisd.org/articles/press-release/winnipeg-based-international-institute-sustainable-development-named INTERNET <1%
18	https://sci-hub.se/10.1108/s2514-175920180000002002 INTERNET <1%
19	https://www.semanticscholar.org/paper/Agricultural-certification-as-a-complementary-tool-d'Albertas-Ruggiero/c4b36577a2ae8ef1bfc889f4e1183a4c5b5d3fa1 INTERNET <1%
20	https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/6c871938-4967-4ca9-913b-2670cad44ed1/content INTERNET <1%
21	http://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/download/327/188 INTERNET <1%
22	https://www.econbiz.de/Record/adapting-to-grand-environmental-challenges-through-collective-entrepreneurship-doh-jonathan/10012145655 INTERNET <1%
23	https://www.researchgate.net/publication/372954184_Kategori_Studi_dan_Kesenjangan_Pengetahuan_di_Literatur_Standar_dan_Sertifikasi_Kopi_Berkelanjutan/fulltext/64d0de9d806a9e4e5cf66045/Kategori-Studi-dan-Kesenjangan-Pengetahuan-di-Literatur-Standar-dan-Sertifikasi-Kopi-Berkelanjutan.pdf INTERNET <1%
24	https://ijebe.feb.unila.ac.id/index.php/ijebe/about/contact INTERNET <1%
25	https://ejournal.unib.ac.id/index.php/potensia/article/download/14448/8133 INTERNET <1%

26	https://ekon.go.id/publikasi/detail/3420/pertemuan-cop26-indonesia-sampaikan-komitmen-kembangkan-ekonomi-hijau-dan-kuatkan-iklim-investasi INTERNET <1%	

EXCLUDE CUSTOM MATCHES	OFF
EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON